

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN PAJAK DAERAH BAGI PENGUSAHA KAKI LIMA DI BIDANG KULINER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Fitri Juliandari

1187010

Pelaku usaha yang memiliki penghasilan selayaknya dikenai kewajiban pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan baik untuk negara maupun untuk daerah. Di tingkat pusat, terdapat Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan seorang wajib pajak. Saat ini, perkembangan usaha kaki lima di bidang kuliner khususnya di kota Bandung berkembang dengan pesat. Para pelaku usaha belum menyadari kewajiban pembayaran pajak. Di sisi lain, kota Bandung telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menetapkan kewajiban pembayaran pajak daerah bagi berbagai sektor usaha. Penelitian ini akan mengkaji apakah PKL sektor kuliner di Kota Bandung dapat dikenai kewajiban pembayaran pajak baik PPh maupun pajak daerah.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu: melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum, interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku.

Pedagang kaki lima yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak dapat dikenai kewajiban membayar PPh, dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Sampai saat ini ketentuan NPWPD dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah belum dapat dikenakan terhadap pedagang usaha kaki lima (penjual makanan). Ketentuan tersebut seharusnya dapat dikenakan terhadap pedagang kaki lima yang memiliki penghasilan di atas nominal tertentu. Dasar pemikirannya adalah bahwa objek yang diperdagangkan sama dengan objek pelayanan restoran. Yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran pajak daerah.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Pedagang Kaki Lima, Pendapatan Daerah, Kesejahteraan,*

ABSTRACT

JUDICIAL ANALYSIS TOWARDS THE OBLIGATION TO PAY LOCAL TAX AND INCOME TAX FOR STREET VENDORS ENTREPRENEURSHIP IN THE CULINARY FIELD BASED ON REGULATION IN INDONESIA'S

Fitri Juliandari

1187010

Entrepreneurs who have income is righteously to be subjected to tax payment obligations. Taxes are a good source of revenue for the State as well as the local government. At the central level, there is income tax which is imposed upon a person who has income and is subjected to the obligation to pay the tax. Currently, the business development of street vendors in the culinary field, especially in the city of Bandung is growing rapidly. The businesses have not been aware of the obligation to pay taxes. On the other hand, the city of Bandung has imposed Bandung Regional Regulation Number 20 Year 2011 on Local Tax which sets the obligation to pay local tax for various business sectors. This research will examine whether culinary street vendor in Bandung can be subjected to both income tax obligation as well as local tax obligation.

The method that will be used by the researcher in this research is normative legal research. While the analysis technique that will be used upon the obtained data will be juridical qualitative which is: through exposure and description based on syllogism rules of law, as well as interpretation and construction of law applicated.

Street vendors which have income above the exemption (PTKP) cannot be liable to pay income tax based on the legal basis of Government Regulation No.46 Year 2013. Until now NPWPD provisions in Bandung Regional Regulation No.20 Year 2011 on Regional Taxes cannot belevied against the business of street vendors (food vendors). Such provisions should be imposed on vendors who have income above a certain nominal. The rationale is that the object that is traded is the same with the object of restaurant service. Which may be subject to local tax payment obligations

Keywords: Local Tax, Street Vendors, Local Income, Welfare.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI.....	
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penulisan	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PERPAJAKAN DI	22
INDONESIA.....	
A. Pengertian dan Azas Hukum Pajak.....	22
B. Jenis-Jenis Pajak yang dikenal di Indonesia.....	31
C. Pengaturan Pemungutan PPh (Pajak Penghasilan).....	33

D. Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Penghasilan Yang Diperoleh Dari Kegiatan Perdagangan	45
E. Sistem Pemungutan Pajak.....	48
BAB III TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.....	50
A. Pajak Daerah Sebagai Bagian Dari Perwujudan Otonomi Daerah.....	50
B. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.....	60
C. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan oleh Pedagang Makanan di Kota Bandung.....	68
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN PAJAK DAERAH BAGI PENGUSAHA KAKI LIMA DI BIDANG KULINER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	71
A. Analisis Pengenaan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	71
B. Analisis Pengenaan Kewajiban Pembayaran Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima di Bidang Kuliner.....	85
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99

B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN (Curriculum Vitae)	

